



Analisis Angka Partisipasi PAUD Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Provinsi Riau

¹ Eva Eriani, ² Anne Mudya Yolanda

¹ STAI Auliaurrasyidin, Tembilahan, Riau, Indonesia

² Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Artikel Histori:

Diterima :

07/01/2022

Direvisi :

26/01/2022

Diterbitkan:

31/01/2022

Keywords:

ECE

Participation

Rate,

Quality's

Education,

Sustainable

Development

Goals (SDGs)

Kata Kunci:

Angka Partisipasi

PAUD,

Pendidikan

Berkualitas,

Tujuan

Pembangunan

Berkelanjutan

(TPB)

DOI:

[https://doi.org/](https://doi.org/10.46963/mas)

[/10.46963/mas](https://doi.org/10.46963/mas)

[h.v5i01.470](https://doi.org/10.46963/mas)

Korespondensi

Penulis:

Eva Eriani

ABSTRACT: Quality education can be traced back to the level of early childhood education as assessed by the participation rate in Early Childhood Education (ECE). The ECE participation rate is determined by three indicators: the School Participation Rate (SPR), the Gross Enrollment Rate (GER), and the Pure Participation Rate (PPR). However, there are still gaps in the national ECE participation rate, children who have not earned ECE services, and some villages that do not have ECE institutions. Although the Ministry of Education and Culture has established guidelines for one village one ECE. The purpose of this research is to provide an overview of ECE participation rates in Riau Province and to explain what factors influence them. This study used descriptive analysis. Secondary data were obtained from the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Education and Culture, and the Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency. The results show that the ECE participation rate in general has been fluctuating, especially in the last five years, and that the GER of children attending ECE in Riau province is still lower than the national rate, while the PPR in rural areas is higher than the NER in urban areas. According to PER by gender, girls who attend ECE on time contribute more than boys. Those are influenced by the fact that ECE institutions are not recorded in the education database, and there are social trends that lead parents to prefer home schooling over ECE institutions, particularly with the impact of the COVID-19.

ABSTRAK: Pendidikan berkualitas dapat dimulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, yakni dengan melihat angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD diukur melalui tiga indikator yakni: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun angka partisipasi PAUD secara nasional masih mengalami kesenjangan, masih terdapat anak yang belum menikmati layanan PAUD dan masih terdapat desa yang belum memiliki lembaga PAUD. Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat aturan untuk 1 desa 1 PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran angka partisipasi PAUD di Provinsi Riau dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Data diperoleh dari data sekunder yang dipublikasikan oleh BPS, Kemendikbud, dan data dari PPN/Bappenas. Sampel kajian yang digunakan adalah APS, APK, dan APM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APS mengalami tren naik dan turun terutama

eva.eriani@stai-tbh.ac.id

dalam lima tahun terakhir, kemudian APK anak yang mengikuti PAUD di provinsi Riau masih berada di bawah angka nasional, sedangkan APM di perdesaan masih lebih tinggi daripada APM perkotaan dan apabila APM dilihat menurut jenis kelamin maka kontribusi anak perempuan yang mengikuti PAUD tepat waktu lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Hal tersebut dipengaruhi oleh lembaga PAUD belum terdata pada Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK), adanya tren sosial yang membuat para orang tua lebih memilih memasukkan anak-anak ke lembaga *home schooling*, dan dampak pandemi covid-19.

Cara mensitasi artikel:

Eriani, E., & Yolanda, A. M. (2022). Analisis Partisipasi PAUD Dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Provinsi Riau. *Mitra Ash-Shibyan: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(01), 1-16. <https://doi.org/10.46963/mash.v5i01.470>

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak mendasar dalam kehidupan manusia dan menjadi pondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu kesepakatan para pemimpin bangsa tentang rencana aksi global dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB/SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), 2020).

TPB/SDGs berisi 17 tujuan yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. 17 tujuan tersebut adalah: 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan; 3) Kehidupan sehat dan sejahtera; 4) Pendidikan berkualitas; 5) Kesetaraan gender; 6) Air bersih dan sanitasi layak; 7) Energi bersih dan terjangkau; 8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Industri, inovasi dan infrastruktur; 10) Berkurangnya kesenjangan; 11) Kota dan permukiman yang berkelanjutan; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Penanganan perubahan iklim; 14) Ekosistem lautan; 15) Ekosistem daratan; 16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Dalam hal ini penulis memfokuskan pada tujuan TPB/SDGs yang keempat yakni meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana pemerintah telah membuat beberapa program untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara nasional. Salah satunya adalah program pendidikan anak usia dini (PAUD), yang dibuat khusus untuk anak-anak. PAUD dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk dapat mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada anak usia 0-6 tahun, yang dilakukan secara aktif dan kreatif sehingga anak memiliki kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional yang diperlukan dirinya maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Nengsi, 2019).

Pada awalnya program pendidikan anak usia dini (PAUD) terbentuk karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan pendidikan sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar (Nengsi, 2019; Latief et al., 2019). Padahal memberikan layanan pendidikan seharusnya dimulai sejak dini agar perkembangan anak lebih optimal, sehingga memiliki kesiapan untuk menjalani pendidikan formal selanjutnya. Pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat memberikan fondasi yang kuat agar dikemudian hari anak siap tampil sebagai penerus bangsa melalui pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan berkualitas memiliki target yakni pada tahun 2030 menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Indikator pendidikan berkualitas dalam ruang lingkup PAUD adalah 1) Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat; 2) Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).

Dalam rangka mencapai pendidikan berkualitas pada jenjang PAUD dapat dilihat dari angka partisipasinya. Angka partisipasi sekolah diukur melalui tiga indikator yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator memiliki esensi yang berbeda. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menggambarkan besar kesempatan seseorang memperoleh pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2021). Angka partisipasi sekolah dibedakan menurut kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2021). Indikator ini menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100% menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya (Safira & Wibowo, 2021). Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Sejalan dengan hal itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara anak usia sekolah dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase (Badan Pusat Statistik, 2021). APM PAUD digunakan untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang PAUD. Semakin tinggi APM maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang tertentu. Nilai ideal dari APM adalah 100%. APM dapat bernilai lebih dari 100 persen ketika banyak siswa luar daerah masuk ke suatu daerah untuk bersekolah, hal ini sering terjadi di kota-kota besar di mana siswa dari pinggiran kota atau perkotaan bersekolah ke kota karena fasilitas yang lebih memadai (Yusup, 2018; Rohmani, 2021). Untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Jadi APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Secara singkat APS menitik beratkan pada partisipasi anak usia sekolah, sedangkan APK dan APM memfokuskan pada cakupan partisipasi sekolah dari sudut pandang jenjang pendidikan. Pemerintah dapat menjadikan APS, APK dan APM untuk melihat indikator pendidikan yang pergerakannya dapat dimonitor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Usaha untuk mencapai TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional. Namun angka partisipasi PAUD secara nasional masih mengalami kesenjangan, hal ini dapat terlihat pada tahun 2018 sebanyak 8 juta lebih anak belum menikmati layanan PAUD dan 22.000

desa juga belum memiliki lembaga PAUD, sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mencanangkan untuk 1 desa 1 PAUD (Priyono, 2018).

Keterlibatan anak dalam PAUD masih relatif kecil karena kurangnya kesadaran orang tua, keterbatasan layanan di daerah terpencil, keterbatasan tenaga terlatih, dan keterbatasan pendanaan. Data ini diperkuat dengan perbandingan jumlah partisipasi PAUD di desa dan di kota, data menunjukkan partisipasi PAUD di kota mencapai angka 55,4% sedangkan di pedesaan hanya sebesar 44,6% (Rohmani, 2021). Kesenjangan yang tinggi antara kualitas PAUD di perkotaan dan pedesaan salah satunya disebabkan akses menuju ibukota provinsi maupun ibukota kabupaten lebih dekat atau dengan kata lain terjadi kesenjangan pendapatan dan geografis. Disparitas yang signifikan dari sisi geografis terjadi karena terdapat banyak keluarga yang tinggal terlalu jauh dari layanan PAUD yang mana meskipun ada subsidi sebagian biaya PAUD dari pemerintah, nominal yang harus dibayarkan masih tidak terjangkau bagi banyak keluarga akibat rendahnya pendapatan keluarga (United Nations Children's Fund (UNICEF), 2020).

Pendidikan di kota memang berbeda dibandingkan di desa, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan sejak dini dan kemudahan akses ke sekolah di kota jauh lebih baik, sebaliknya pendidikan di desa kurang mampu berhadapan dengan pesatnya kemajuan kota salah satunya diakibatkan oleh kelemahan sistem pendidikan yang ada di desa itu sendiri (Anas et al., 2015; Nengsi, 2019). Sering kali pengembangan pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah desa banyak yang tidak disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Bahkan yang lebih memprihatinkan dalam penyusunan kurikulum terkadang disamakan dengan pengembangan kurikulum sekolah-sekolah di kota.

Hal ini menunjukkan sebaran partisipasi di setiap provinsi tidak merata, sedangkan pembangunan nasional memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Salah satu provinsi yang berusaha untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD adalah Riau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kesenjangan angka partisipasi PAUD di kota dan di desa tidak jauh berbeda, namun masih berada di bawah angka partisipasi PAUD secara nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran angka partisipasi PAUD di Provinsi Riau dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sehingga dapat memberikan informasi bagi pemangku kebijakan yang berkaitan dengan PAUD di Indonesia dan menjadi bahan rujukan bagi penulis lain untuk penelitian selanjutnya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Data yang digunakan berupa Indikator Partisipasi Sekolah yang diolah oleh BPS dalam Publikasi Statistika Pendidikan 2021 dan web BPS, data dalam Publikasi Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2020/2021 data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statistik Pendidikan Anak Usia Dini, dan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) (Badan Pusat Statistik, 2021; Kemendikbud, 2021; Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Sebagai tambahan dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi angka partisipasi PAUD, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi literatur.

Sampel kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah dapat menjadikan APS, APK dan APM untuk melihat indikator pendidikan yang pergerakannya dapat dimonitor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator memiliki esensi berbeda. Secara resmi, pendidikan formal di Indonesia mulai dihitung pada jenjang Sekolah Dasar. Namun, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi PAUD salah satunya dengan memasukkan PAUD dalam Sistem Pendidikan Nasional dan menargetkan 75% anak sudah mendapat layanan pendidikan dan perawatan anak usia dini (Puspitasari, 2016).

Tabel 1. Partisipasi Anak Usia yang Sedang Mengikuti PAUD tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Usia 3-4 tahun	19.24	21.67	18.57	20.51	21.34
Usia 5-6 tahun	49.39	55.38	55.61	54.77	49.63
Usia 3-6 tahun	34.36	38.61	37.43	37.98	35.74

Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk lembaga dimulai sejak anak berusia 3 tahun. Berdasarkan data yang dirangkum selama lima tahun terakhir (Tabel 1), partisipasi anak yang sedang mengikuti PAUD pada usia 3-4 tahun mengalami tren naik dan turun dengan partisipasi tertinggi pada tahun 2018 sebesar 21.67, partisipasi tertinggi anak usia 5-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD sebesar 55.61 pada tahun 2019, sedangkan secara gabungan pada PAUD untuk usia 3-6 tahun pada tahun 2018 mencapai angka 38.61.

Tabel 2. Partisipasi Anak yang Pernah dan Sedang Mengikuti PAUD tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Usia 3-4 tahun	20.41	22.25	19.26	21.16	21.80
Usia 5-6 tahun	71.82	74.20	73.31	73.23	68.85
Usia 3-6 tahun	46.20	48.35	46.79	47.71	45.76

Secara keseluruhan selama kurun waktu 2017-2021, proporsi anak usia 3-6 tahun yang sedang/pernah mengikuti pendidikan anak usia dini relatif bergerak pada angka 45- 48 (lihat Tabel 2), dan mengalami penurunan pada satu tahun terakhir menjadi 45.76. Pada kelompok usia 3-4 tahun, partisipasi anak yang sedang/pernah mengikuti pendidikan anak usia dini mengalami sedikit kenaikan dari 21.16 pada tahun 2020 menjadi 21.80 pada tahun 2021. Hal ini berarti setiap satu dari lima anak usia 3-4 tahun sedang/pernah berpartisipasi dalam PAUD per 2021. Partisipasi dalam PAUD tertinggi diberikan oleh kelompok usia 5-6 tahun yang mana proporsinya mencapai angka 70-an persen, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021 ke angka 68.85 akibat efek pandemi Covid-19.

Tabel 3. Angka Kesiapan Sekolah (AKS) tahun 2019–2021

Indikator	2019	2020	2021
AKS Total	74.80	74.96	74.69

Partisipasi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini dapat pula dilihat dari Angka Kesiapan Sekolah (AKS), yaitu persentase siswa kelas 1 Sekolah Dasar (SD) yang pernah menempuh PAUD. Secara agregat, AKS dalam tiga tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi angka ini telah melampaui target pemerintah (72,77%). AKS menjadi salah satu perhatian utama pemerintah ditunjukkan dari dimasukkannya AKS dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pendidikan anak usia dini menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan nasional karena PAUD merupakan bagian dari pencapaian TPB pada kategori pendidikan berkualitas. Proses ini tentunya membutuhkan sinergi kebijakan perencanaan pada dari lingkup nasional sampai tingkat daerah. Salah satu daerah yang masih berjuang dalam peningkatan PAUD adalah provinsi Riau. Pada 2020/2021, lembaga penyelenggara PAUD di provinsi Riau menaungi 126.204 peserta didik dengan 16.204 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK). Statistik juga mencatat bahwa pada jenjang ini terdiri atas 10.107 rombongan belajar yang tersebar dalam 9.548 ruang kelas.

Pada 2020/2021, provinsi Riau memiliki 4.077 lembaga PAUD yang terdiri atas 2212 Taman Kanak-Kanak (TK), 1678 Kelompok Bermain (KB), 90 Taman Penitipan Anak (TPA), dan 97 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Menurut status kepemilikannya, lembaga tersebut terbagi atas 26 lembaga milik pusat, 116 lembaga milik daerah, 2959 milik yayasan, dan 976 kategori lainnya.

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Lembaga PAUD di Provinsi Riau tahun 2017/2018 – 2020/2021

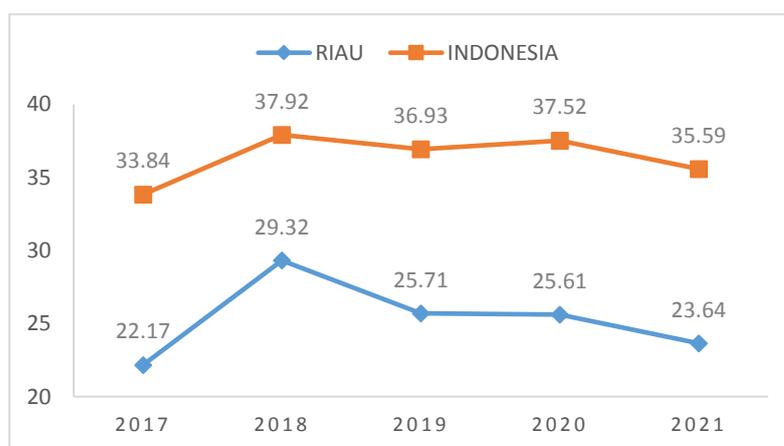
Kategori	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Lembaga	4.641	4.688	4.752	4.077
Peserta Didik	353.016	130.218	138.245	126.204

Jumlah lembaga PAUD di provinsi Riau mengalami penambahan sejak tahun ajaran 2017/2018 sampai 2019/2020, tetapi turun cukup signifikan pada tahun 2020/2021 menjadi 4077 lembaga. Berkurangnya lembaga PAUD dimungkinkan terjadi akibat efek pandemi, sejalan dengan

adanya kebijakan pemerintah untuk belajar dan bekerja dari rumah. Tabel 4 memperlihatkan bahwa terjadi penurunan jumlah siswa dari 138.245 pada tahun 2019/2020 menjadi 126.204 pada tahun 2020/2021.

Hasil Susenas Maret 2021 yang diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase Penduduk 0-6 Tahun yang pernah/ sedang mengikuti PAUD di provinsi Riau tahun 2021 sebesar 19.94 persen. Angka ini cukup jauh dari angka secara nasional dengan persentase penduduk 0-6 Tahun yang pernah/ sedang mengikuti PAUD mencapai 26.58 persen.

Berdasarkan tipe daerah, persentase penduduk 0-6 Tahun yang pernah/ sedang mengikuti PAUD di provinsi Riau tahun 2021 di perdesaan (20.05) lebih tinggi dari pada di wilayah perkotaan (19.77). Artinya, kesenjangan partisipasi PAUD antar tipe daerah tidak terlalu kentara. Menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan (20.32) usia 0-6 tahun lebih banyak yang pernah/ sedang mengikuti PAUD di provinsi Riau tahun 2021, daripada laki-laki (19.53). Angka ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung memberikan kontribusi lebih besar dalam partisipasi sekolah sejak jenjang PAUD, dibandingkan laki-laki.



Gambar 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Provinsi Riau 2017–2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti PAUD di provinsi Riau dalam lima tahun terakhir masih berada di bawah angka nasional. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, APK tertinggi yang bisa diraih provinsi Riau mencapai 29.32 pada 2018. Pada 2019 - 2021, pergerakan APK Provinsi Riau menunjukkan tren menurun yang diduga sebagai efek pandemi sehingga berkurangnya partisipasi anak usia dini mengikuti pendidikan anak usia dini.

APK merupakan ukuran partisipasi sekolah berdasarkan perspektif jenjang pendidikan, dalam hal ini jenjang PAUD. BPS mendefinisikan APK PAUD 3-5 Tahun adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA/PAUD) tanpa memandang usia terhadap penduduk kelompok usia 3-5 tahun, sedangkan APK PAUD 3-6 Tahun adalah jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini (TK/BA/RA/PAUD) tanpa memandang usia terhadap penduduk kelompok usia 3-6 tahun. APK pada jenjang PAUD tahun 2021 menggambarkan persentase anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini pada tahun ajaran 2020/2021 terhadap total anak usia dini (3-5 tahun dan 3-6 tahun).

Tabel 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Provinsi Riau Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Indikator	Pedesaan	Perkotaan	Laki-laki	Perempuan	Total
Usia 3-5 tahun	33.03	29.17	30.26	32.76	31.46
Usia 3-6 tahun	24.56	22.27	22.87	24.46	23.64

Berdasarkan data APK kelompok Umur pada Tabel 5, baik usia 3-5 tahun maupun 3-6 tahun, APK pedesaan masih lebih tinggi daripada APK perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah terkait 1 desa 1 PAUD berjalan relatif lancar. Alasan ini diperkuat dengan tidak jauhnya kesenjangan (disparitas) antara APK desa dan kota, bahkan statistik wilayah pedesaan menunjukkan angka yang lebih baik.

Menurut jenis kelamin, proporsi APK anak perempuan di provinsi Riau lebih besar daripada APK anak laki-laki pada kelompok usia 3-5 dan 3-6 tahun. Secara agregat total, APK kelompok usia 3-5 lebih tinggi daripada usia 3-6 tahun. Ketimpangan akses terhadap pendidikan anak usia dini antar wilayah di provinsi Riau tidak terlalu tampak, hanya saja persentasenya masih berada di bawah angka nasional, sehingga pemangku kebijakan masih perlu meluncurkan program-program kreatif agar partisipasi orang tua memasukkan anaknya pada jenjang PAUD semakin meningkat.

Indikator lain dalam partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM PAUD merupakan ukuran partisipasi sekolah pada jenjang PAUD bagi individu kelompok usia pra sekolah yang bersesuaian dengan jenjang PAUD atau dengan kata lain partisipasi penduduk yang mengikuti PAUD tepat waktu. APM selalu lebih rendah atau sama dengan

APK bergantung pada banyaknya penduduk usia sekolah yang mengikuti sekolah lebih cepat, lebih lambat, atau harus mengulang kelas pada jenjang PAUD.

Tabel 6. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Provinsi Riau Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin

Indikator	Pedesaan	Perkotaan	Laki-laki	Perempuan	Total
Usia 3-5 tahun	19.92	16.24	17.25	19.69	18.42
Usia 3-6 tahun	24.39	21.83	22.41	24.39	23.37

Tabel 6 menunjukkan bahwa persentase APM provinsi Riau menurut tipe daerah memiliki pola yang serupa dengan APK tahun 2021. APM pada kelompok usia 3-5 dan 3-6 di pedesaan masih lebih tinggi daripada APM perkotaan. Menurut jenis kelamin, kontribusi anak perempuan yang mengikuti PAUD tepat waktu lebih besar dibandingkan anak laki-laki pada tahun 2021.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi PAUD

Pendidikan anak usia dini digencarkan dengan gerakan PAUD-isasi, peningkatan kualitas PAUD, dan pendidikan dasar berkualitas dan merata. Diharapkan pada tahun 2030 seluruh populasi anak usia dini memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Investasi PAUD harus mencakup infrastruktur dan ketenagaan, yang pada saat ini masih jauh dari standar yang diharapkan. Untuk mencapai harapan anak usia dini masa kini menjadi manusia Indonesia produktif pada 15 tahun yang akan datang maka PAUD tidak boleh diabaikan.

Urgensi terhadap penyelenggaraan PAUD sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Nengsi (2019) menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab anak usia dini belum mendapatkan layanan PAUD, sebagai berikut:

- a. Rendahnya penerimaan orang tua terhadap penyelenggaraan PAUD. Belum semua orang tua memahami pentingnya PAUD, rendahnya kesadaran masyarakat tersebut dapat dipengaruhi banyak hal. Misalnya faktor pendidikan orang tua, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan data terkait adanya disparitas pendapatan keluarga, sehingga dilihat dari sudut pandang ekonomi misalnya, orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah beranggapan jika memasukkan anaknya ke PAUD akan menambah beban hidup keluarga.

- b. Terbatasnya jumlah Lembaga PAUD. Terbatasnya jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah terpencil, daerah pedesaan, dan daerah perbatasan. Pemerintah daerah harusnya bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan program pendidikan anak usia dini yang mengharuskan sebuah desa minimal memiliki 1 lembaga PAUD. Upaya baik dari pemerintah dapat mengatasi temuan dari analisis deskriptif terkait kesenjangan geografis, sehingga jarak antara rumah keluarga dengan lembaga penyelenggara semakin dekat. Pada data Partisipasi Sekolah jenjang PAUD di provinsi Riau diketahui bahwa APK dan APM perdesaan masih lebih tinggi daripada perkotaan sebagai implikasi rendahnya disparitas geografis dan cukup berhasilnya program pemerintah terkait 1 desa 1 PAUD.
- c. Terbatasnya fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD. Fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah juga menjadi salah satu pertimbangan yang kuat bagi orang tua untuk memasukkan anaknya di Lembaga PAUD. Terkadang bagi orang tua apabila suatu lembaga memiliki sarana dan prasarana yang baik maka pembelajaran akan lebih optimal. Begitu pula sebaliknya apabila fasilitas yang disediakan lembaga kurang, maka pembelajaran yang terjadi pun tidak akan maksimal.
- d. Masalah profesionalisme guru PAUD; Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 yang dijelaskan bahwa guru PAUD minimal Diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang PAUD atau Psikologi. Realitasnya masih terdapat guru yang mengajar di PAUD tidak berasal dari lulusan yang telah ditetapkan, bahkan masih ada yang hanya lulusan SMA. Hal ini seharusnya juga mendapat perhatian dari pemerintah agar program ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana program, sehingga mewujudkan PAUD yang menjangkau masyarakat kurang mampu namun tetap berkualitas.

Mengacu pada hasil analisis partisipasi sekolah PAUD di Riau, faktor keterbatasan fasilitas dan profesionalisme guru merupakan komponen yang perlu ditingkatkan agar angka partisipasi PAUD di Riau dapat meningkat atau mengejar angka nasional. Faktor-faktor di atas juga diperkuat dengan faktor penyebab turunnya angka partisipasi. PAUD (Safira & Wibowo, 2021) seperti: 1) Lembaga PAUD yang belum terdata pada Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK), terutama satuan PAUD yang berada di daerah terpencil yang minim akses internet sehingga belum bisa

masuk dalam perhitungan angka partisipasi PAUD; 2) Adanya tren sosial yang membuat para orang tua lebih memilih memasukkan anak-anak ke lembaga *home schooling*; 3) Dampak pandemik covid-19 yang membuat orang tua menunda memasukkan anak ke PAUD (memberikan pendidikan dari rumah saja), dengan alasan proteksi kesehatan keluarga serta mengikuti aturan pemerintah untuk bekerja dan belajar dari rumah.

Untuk membenahi turunnya angka partisipasi PAUD dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas, maka pemerintah dapat melakukan beberapa hal berikut (Darman, 2017).

- a. Meningkatkan anggaran pendidikan, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta;
- b. Manajemen pengelolaan sekolah yang baik, yang memperhatikan profesionalisme dan kreativitas lembaga penyelenggara pendidikan;
- c. Mengembalikan fungsi sekolah sebagai wadah mencerdaskan generasi penerus bangsa, bukan sebagai ladang bisnis;
- d. Melakukan perbaikan kurikulum. Penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala potensi alam, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada, serta yang mengetahui segala bentuk kondisi di lapangan hanyalah guru di sekolah tersebut; dan
- e. Pendidikan karakter, agar para generasi penerus bangsa tidak hanya cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara sosial emosional sehingga memiliki kepribadian yang kuat. Dan 6) Pemberdayaan guru, sebaiknya pemerintah memberdayakan guru dengan program-program latihan sehingga mereka mampu mengembangkan model-model pengajaran secara variatif.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas, tentunya pada periode tahun 2010 sampai tahun 2030 pemerintah harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dengan sumber daya tersebut dapat menyiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai ke perguruan tinggi, dan tentu saja perluasan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan.

SIMPULAN

Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengalami tren naik dan turun terutama dalam lima tahun terakhir, kemudian Angka Partisipasi Kasar

(APK) anak yang mengikuti PAUD di provinsi Riau masih berada di bawah angka nasional, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) di perdesaan masih lebih tinggi daripada APM perkotaan dan apabila APM dilihat menurut jenis kelamin maka kontribusi anak perempuan yang mengikuti PAUD tepat waktu lebih besar dibandingkan anak laki-laki. Beberapa faktor yang mempengaruhi angka partisipasi PAUD karena lembaga PAUD belum terdata pada Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK), adanya tren sosial yang membuat para orang tua lebih memilih memasukkan anak-anak ke lembaga *home schooling*, serta dampak pandemi covid-19. Pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia masih belum merata. Kondisi geografis berupa luasnya cakupan wilayah jumlah penduduk yang besar serta lembaga pendidikan anak usia dini yang terbatas membuat pemerintah perlu bekerja keras untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk membenahi penurunan angka partisipasi PAUD dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, guru, siswa, orang tua dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa dan kota dalam potret pendidikan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Pendidikan 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. *Jurnal Edik Informatika: Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika*, 3(2), 73–87. <https://doi.org/10.22202/jei.2017.v3i2.1320>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi (II)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Latief, J. A., Amrullah, & Awalunisah, S. (2019). Analisis Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini di Sulawesi Tengah. *Bomba: Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 65–73.
- Nengsi, A. W. (2019). Analisis problematika anak usia 3-5 tahun belum mendapatkan pendidikan di PAUD. *Al Fitra: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 2(2), 300–308.

- Priyono, D. (2018). Sinergi keluarga dan sekolah menuju PAUD berkualitas. *Seminar Nasional Dan Call for Paper "Membangun Sinergitas Keluarga Dan Sekolah Menuju PAUD Berkualitas,"* 12-16.
- Puspitasari, E. (2016). Pengaruh penerapan pos PAUD keliling terhadap peningkatan apk paud di desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten kampar. *Educhild*, 5(1), 20-26.
- Rohmani, N. (2021). Analisis angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 625-632. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.262>
- Safira, N., & Wibowo, Y. H. (2021). Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni sebagai indikator keberhasilan pendidikan indonesia. *Jurnal PAKAR Pendidikan*, 19(2), 101-115.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). *Situasi anak di indonesia 2020 - tren, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak-hak anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Yusup, S. H. (2018). Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pendidikan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Jurnal Comm-Edu*, 1(3), 165-174.

Halaman ini dibiarkan kosong